

PERAN PASAR TRADISIONAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Mahmudah Mulia Muhammad
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: udha009@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keberadaan pasar tradisional dalam menunjang pembangunan ekonomi di kota gorontalo, (2) menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah kota gorontalo dengan keberadaan pasar tradisional, dan (3) menganalisis prespektif ekonomi syariah terhadap praktik pasar tradisional yang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan sumber data berupa pedagang, pembeli, dan pemangku kepentingan pasar tradisional dari pemerintah kota Gorontalo, termasuk dinas pendapatan daerah dan pengelola pasar, serta akademisi ekonomi Syariah dengan jumlah informan sebanyak 35 orang. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahap: pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi pasar tradisional dapat di gambarkan sebagai “enggan hidup tetapi tidak rela mati”. Ungkapan tersebut merupakan analisis sederhana terhadap kondisi pasar tradisional di kota Gorontalo, yang merupakan salah satu asset kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pendapatan Asli Daerah, Pasar Tradisional.

Abstract

The study aimed: 1) to describe the existence of traditional markets in supporting the economic development at the city of Gorontalo, 2) to analyze the progress of local revenues of Gorontalo with the traditional markets existence, 3) to analyze the Islamic economics perspective of the traditional market practices associated with the increasing of the local revenues. The study was a qualitative case study with the data sources of the traditional market traders, buyers and stakeholders from the Gorontalo government including the local revenue management and market managers, as well as from Islamic economics academia with the number of informants as many as 35 people. Observation, interview, and documentation were employed in collecting the data which then processed and analyzed through three stages of data collection, data reduction, and data presentation. The study results revealed that traditional markets condition could be described as "reluctant to live but not willing to die". The phrase was a simple analysis of the traditional markets condition at the city of Gorontalo which one of the city treasures to increase the local revenues.

Keywords: Sharia Economy, Local Original Income, Traditional Markets.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi mencirikan perkembangan suatu kota di samping aktivitas lain yang ada. Salah satu indikasi dari dinamika perkembangan kota dapat dilihat dari kondisi perekonomian kota tersebut (*urban economic*). Secara umum, ciri perkembangan kota dapat ditentukan oleh kapasitas sarana yang ada di kota itu. Kondisi tersebut mengindikasikan sarana menjadi bagian yang sangat vital dalam perkembangan suatu kota. Kapasitas sarana perkotaan ini secara umum dapat dilihat dari jenisnya, daya tampung atau daya dukung dan sistem pengelolaannya serta kesesuaiannya dengan kondisi kota atau daerah baik secara fisik, sosial dan ekonomi.

Begitupula kemudian, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Salah satu kendala yang dihadapi daerah kabupaten dan kota dalam melaksanakan urusan pemerintahannya adalah faktor kemampuan daerah. Kemampuan daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, karena keadaan dan kondisi masing-masing daerah tidak sama. Walaupun ada daerah yang pada kenyataannya mampu mengatur urusan rumah tangganya sendiri dilihat dari kemampuan keuangan, aparatur, ekonomi, tetapi tidak didukung oleh kemauan dan keinginan pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi dalam menyerahkan urusan pemerintahan kepada daerah kabupaten dan kota untuk mengurus rumah tangganya, daerah kabupaten dan kota tidak dapat berbuat banyak, karena dibatasi oleh keterbatasan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

Penyerahan urusan-urusan pada daerah kabupaten dan kota menggunakan dua sistem yaitu sistem penyerahan langsung dan tidak langsung. Dalam sistem penyerahan langsung urusan-urusan pada daerah kabupaten dan kota sering diterjemahkan sebagai urusan pangkal. Sedangkan pada sistem urusan penyerahan tidak langsung menggunakan propinsi sebagai agen penyalur. Pada tahap awal urusan-urusan diserahkan pada propinsi untuk kemudian diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota apabila telah dianggap mampu untuk melaksanakan otonomi tersebut. Inilah yang merupakan faktor panghalang bagi daerah kabupaten dan kota karena hak mereka atas urusan-urusan yang ada dihadap oleh keengganan daerah tingkat I untuk menyerahkan secara ikhlas. Daerah tingkat I selalu berlindung di balik ketidakmampuan daerah kabupaten dan kota.

Mengetahui kemampuan daerah berotonomi, perlu disimak pernyataan Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Otonomi Daerah, bahwa dari 292 daerah tingkat II hanya 64 yang mampu membiayai pembangunan daerahnya. Ada lima variabel sebagai faktor pokok untuk mengukur kemampuan tersebut, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah yang ditentukan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah keseluruhan pembiayaan daerah; (2) kemampuan aparat, rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat; (3) partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut kesehatan dan pelayanan

sosial; (4) kemampuan ekonomi, yaitu nilai rata-rata pendapatan perkapita, persentase sektor-sektor pertanian pertambangan pemerintahan terhadap PDRB; dan (5) kemampuan demografi, indikasinya jumlah pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, rasio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk usia muda, pendidikan diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja.¹

Begitupula kemudian bahwa pada dasarnya kunci dari pelaksanaan otonomi daerah adalah besaran kewenangan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah, jadi bukan pada besar dan kecilnya uang yang dimiliki oleh pemerintah di daerah, karena subsidi keuangan dari pemerintah pusat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, keberadaan pemerintah daerah telah membantu pemerintah pusat. Dengan demikian, tolak ukur otonomi daerah adalah adanya kewenangan bagi daerah untuk membuat keputusan-keputusan yang berlaku setempat dalam menyusun peraturan daerah dan memungut pajak serta sumber-sumber pendapatan lain bagi pembiayaan rumah tangganya.

Terlepas dari itu, dinamika perekonomian suatu kota ditentukan oleh efisiensi penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di kota tersebut. Perkembangan perekonomian kota ini secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di kota itu dan juga di kawasan sekitarnya. Salah satu sarana perdagangan yang ada di kota adalah pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Keberadaan sarana perdagangan ini berfungsi sebagai: salah satu sub sistem dari sistem pelayanan sarana kota; salah satu tempat kerja dan sumber pendapatan masyarakat; salah satu pusat retail dalam sistem perdagangan kota/daerah; dan salah satu sumber pendapatan asli daerah.²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data. Penelitian ini bersifat kualitatif yang diarahkan pada penelitian studi kasus, yakni penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, karakteristik penelitian studi kasus pada umumnya sama dengan karakteristik penelitian kualitatif pada umumnya. Karakteristik penelitian kualitatif dilandasi oleh tujuan utamanya yaitu untuk menggali substansi mendasar di balik fakta yang terjadi di dunia. Secara khusus, penelitian studi kasus memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Kekhususan penelitian studi kasus adalah pada cara pandang penelitiannya terhadap obyek yang diteliti.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 107.

²Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), h. 49.

³<http://wordpress.com/2012/09/27/karakteristik-penelitian-studi-kasus>, diunduh pada tanggal 14 Mei 2016.

Kota Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Secara geografis mempunyai luas 64,79 km² atau 0,53% dari luas Propinsi Gorontalo dan secara efektif luas wilayah kota adalah 37,02 km². Kota Gorontalo dibagi menjadi 6 (enam) kecamatan, terdiri dari 49 desa/kelurahan. Kondisi topografi Kota Gorontalo adalah tanah datar yang dilalui tiga sungai yang bermuara di teluk Tomini (Gorontalo) pelabuhan Gorontalo. Bagian selatan diapit dua pegunungan berbatu kapur/pasir. Ketinggian dari permukaan laut antara 0-500 meter. Pesisir pantai landai berpasir.⁴ Sejak tahun 2004 Kota Gorontalo terdiri atas enam kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kota Barat
2. Kecamatan Duingi
3. Kecamatan Kota Selatan
4. Kecamatan Kota Timur
5. Kecamatan Kota Utara
6. Kecamatan Kota Tengah⁵

Keenam kecamatan ini terbagi menjadi 49 kelurahan. Semua kelurahan sudah pada tahap desa swasembada. Kota Gorontalo terdiri dari 279 RW dan 982 RT. Kecamatan Kota Barat terdiri dari 7 kelurahan, Duingi 5 kelurahan, Kota Selatan 10 kelurahan, Kota Timur 11 kelurahan, Kota Utara 10 kelurahan, dan Kota Tengah 6 kelurahan.⁶ Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Kota Gorontalo pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari Sensus) berjumlah 119.307 jiwa. Jumlah itu meningkat rata-rata 2,2% pertahunnya dibandingkan dengan jumlah tahun 1980. Sedangkan berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995 jumlah penduduk tercatat sebanyak 130.645 jiwa. Pada Sensus Penduduk tahun 2000 penduduk kota Gorontalo tercatat sebanyak 134.931 jiwa.⁷

Menelusuri catatan sejarah, dalam kerangka pembangunan ekonomi, kepentingan bersama di atas kepentingan individu merupakan ciri ekonomi masyarakat Gorontalo sejak awal periode sejarahnya. Kerajaan Gorontalo yang terbentuk pada tahun 1385 merupakan kesatuan dari 17 kerajaan kecil yang disebut *linula*. Kata tersebut kurang lebih sama dengan *hentea* yang artinya percekcoakan atau perselisihan. Diduga ke 17 *linula* tersebut berasal dari satu asal usul kerajaan tertua yang kemudian berselisih disebabkan corak pemerintahan yang otoriter dan sistem ekonomi yang tidak lagi didasarkan oleh kepentingan bersama.⁸ Sistem ekonomi tersebut kembali aktif setelah aturan perundangannya ditata oleh golongan *tiyombu* sebagai badan pelaksana undang-undang bidang ekonomi dan kesejahteraan, di bawah pemerintahan Maharaja I Ilahudu. Berkat kepemimpinan yang baik (*good government*)

⁴Tim Penyusun, *Gorontalo dalam Angka, 2012 (Gorontalo in Figure, 2012)* (Gorontalo: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, 2012), h. 22; Anonimous, *Profil Kota Gorontalo* (Gorontalo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo, 2011), h. 9.

⁵Tim Penyusun, *Gorontalo dalam Angka*, h. 23.

⁶Tim Penyusun, *Gorontalo dalam Angka*, h. 22.

⁷Tim Penyusun, *Gorontalo dalam Angka*, h. 23.

⁸Alim S. Niode (38 Tahun), Sejarawan dan Budayawan, *Wawancara*, Gorontalo, 12 Juli 2016.

terjadi perubahan *economic resources* dari ladang berpindah (*butu*) menjadi berladang tetap (*butu payango*). Kekeluargaan dan kepentingan bersama dalam sistem ekonomi tersebut terdiri dari 13 sub sistem sebagai berikut:

Berikut ini adalah 13 sub sistem yang dimaksudkan yaitu: (1) *hulanga*, artinya melakukan pekerjaan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial; (2) *huyula*, artinya melaksanakan suatu pekerjaan bersama oleh sekelompok anggota masyarakat dalam arti saling membantu secara timbal balik, misalnya dalam mendirikan rumah; (3) *himbunga*, perhimpunan beberapa orang (misalnya 10 orang) untuk membuka sebuah ladang, selanjutnya ladang tersebut dikerjakan bersama, hasilnya dibagi sama rata; (4) *palita*, artinya sama dengan *himbunga* tetapi pemilikan ladang secara perorangan. Jika pada *himbungan* hasilnya dibagi rata maka pada *palita* masing-masing orang dalam himpunan hanya akan memperoleh hasil panen dari ladang yang menjadi miliknya; (5) *tiayo*, artinya permintaan bantuan seorang penduduk kepada tetangga, kenalan atau kerabatnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak disanggupinya sendiri. Tidak dipungut biaya atas pengerjaan tersebut kecuali kewajiban memberi makan kepada mereka hingga pekerjaan tersebut selesai; (6) *dembulo*, artinya sumbangan berupa *natura* dengan tidak mengharap balasan dalam kegiatan sosial seperti kematian, pernikahan, dan lain-lain; (7) *depita*, artinya saling memberi antar tetangga, kenalan dan kawan berupa hasil *in natura* yang berkelebihan padanya; (8) *timoa*, artinya sumbang menyumbang berupa benda *in natura* di lingkungan pemuda yang akan menikah. Penerima sumbangan wajib mengembalikan sumbangan yang sama bila sang pemuda penyumbang kelak akan menikah; (9) *heiya*, ialah sumbang menyumbang berupa uang dalam kegiatan sosial seperti pelaksanaan pesta; (10) *bayawa*, ialah kewajiban yang dibebankan oleh hukum adat kepada seseorang untuk member nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu lagi bekerja; (11) *bubaya*, ialah bantuan tenaga anggota masyarakat untuk sesuatu kepentingan pejabat pemerintah, misalnya membersihkan pekarangan; (12) *hiyo*, ialah pajak *in natura* yang dipungut oleh pemerintah, biasanya $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{20}$ dari hasil kotor; (13) *ontu*, ialah persembahan hasil pertanian sebelum dilakukan panen secara keseluruhan.⁹

Keberadaan pasar tradisional yang diwariskan dari sistem ekonomi masa lalu telah memberikan sumbangsih besar pada peningkatan PAD kota Gorontalo. Data yang peneliti peroleh melalui pengelola pasar bahwa jumlah pedagang yang ada pada pasar tradisional rata-rata sebanyak 693 pedagang dengan total retribusi yang disetor tiap minggu sebesar Rp. 1.084.000,- dan penagihan retribusi dilakukan setelah aktivitas pasar berakhir.¹⁰ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo bahwa sumbangsih retribusi pelayanan pasar menduduki urutan ketiga dalam hasil retribusi daerah kota Gorontalo. Sumbangsih urutan pertama dan kedua adalah retribusi penyelenggaraan pelayanan kesehatan

⁹Alim S. Niode (38 Tahun), Sejarawan dan Budayawan, *Wawancara*, Gorontalo, 12 Juli 2016.

¹⁰Syahbudin (45 Tahun), Kepala Kantor Pengelola Pasar, *Wawancara*, Gorontalo, 12 September 2016

dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.¹¹

Setelah melakukan pengkajian mendalam yang diawali dengan pengamatan terhadap objek penelitian dalam hal ini adalah kondisi riil pasar tradisional maka peneliti merumuskan hasil penelitian yang terekam dari ungkapan informan lewat wawancara dan pengamatan peneliti yang menyangkut etika perdagangan khususnya pada pedagang di pasar tradisional Kota Gorontalo. Pada umumnya pedagang pasar tradisional di Kota Gorontalo dalam melaksanakan usaha dagangannya tidak begitu paham mengenai pentingnya etika dalam berdagang. Aktivitas dagang dilakukan sebagai rutinitas dan hanya berorientasi atau berfokus pada keuntungan semata. Masih sering dijumpai ketimpangan-ketimpangan baik yang dilakukan secara sengaja atau karena keteledoran. Diantaranya dapat diungkapkan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan dan wawancara berikut:

- a. Masih terjadi kekeliruan dalam menakar barang jualan
 - b. Mencampur barang berkualitas dan tidak berkualitas
 - c. Masih terdapat penjualan barang kadaluarsa
 - d. Terjadi kebohongan dalam menarik minat pembeli dan sumpah palsu.
 - e. Masih terlibat dalam rentenir dan peminjaman dana dengan sistem bunga.
- D. Kesadaran akan pentingnya mengeluarkan zakat perdaganga

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya serta hasil penelitian yang ditemukan pada objek penelitian ini, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasar-pasar tradisional di Kota Gorontalo memiliki peran signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah PAD Kota Gorontalo setiap tahunnya yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar, dan dari 40 % retribusi pelayanan pasar tersebut, Pasar Sabtu menyumbang 15 % terhadap penambahan jumlah PAD Kota Gorontalo. Peningkatan capaian retribusi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (a) adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga menyebabkan terjadi peningkatan lapak-lapak pedagang dan memberikan implikasi pada peningkatan retribusi pasar; (b) pemerintah Kota Gorontalo menaikkan tarif yang tetap tidak membebani pedagang oleh karena daya beli masyarakat yang juga semakin meningkat.
2. Keterbatasan lahan pertanian dan perkebunan di wilayah kota menjadikan pemerintah Kota Gorontalo sangat mengandalkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan PAD. Beberapa upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengembangkan dan mempertahankan keberadaan Pasar Sabtu Kota Gorontalo antara lain adalah: (1) menjaga kenaikan tarif retribusi agar tetap dalam standar kemampuan pedagang; (2) meningkatkan produksi industri rakyat dan peternakan yang menjadi produsen pasar; (3) mempermudah perizinan penambahan lapak pedagang; (4) peningkatan kinerja pengelola pasar; (5) melibatkan instansi terkait yang bertanggungjawab terhadap perbaikan infrastruktur pasar; (6) menjaga

¹¹ Syahbudin (45 Tahun), Kepala Kantor Pengelola Pasar, *Wawancara*, Gorontalo, 12 September 2016

lingkungan pasar agar tetap kondusif dan nyaman bagi pedagang dan konsumen; (7) senantiasa memonitoring fluktuasi kenaikan harga barang; dan (8) membantu pedagang melalui pengucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran dalam proses jual beli yang terjadi di pasar tradisional yang ada di Kota Gorontalo. Penyimpangan tersebut berupa adanya kecurangan dalam takaran, adanya barang dagangan yang tidak layak jual karena kadaluarsa atau karena busuk, pungutan liar kepada pedagang oleh oknum-oknum tertentu serta penentuan lokasi lapak yang bernuansa nepotisme. Ekonomi Islam melalui bank-bank syariah tampaknya belum memberikan andil besar dalam memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk memberdayakan diri melalui pinjaman lunak. MUI Gorontalo juga tampak tidak bekerja maksimal untuk ikut melakukan sosialisasi terhadap para pedagang tentang praktik perdagangan yang islami. Idealnya, pemerintah melalui Bazda Kota Gorontalo ikut andil memberikan pinjaman modal kepada para pedagang agar dapat tetap eksis menjaga geliat pasar tradisional di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 107.
- Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), h. 49.
- [http://wordpress.com/2012/09/27/karakteristik penelitian studi kasus](http://wordpress.com/2012/09/27/karakteristik-penelitian-studi-kasus), diunduh pada tanggal 14 Mei 2016.
- Tim Penyusun, *Gorontalo dalam Angka, 2012 (Gorontalo in Figure, 2012)* (Gorontalo: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, 2012), h. 22; Anonymous, *Profil Kota Gorontalo* (Gorontalo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo, 2011), h. 9
- Alim S. Niode (38 Tahun), Sejarawan dan Budayawan, *Wawancara*, Gorontalo, 12 Juli 2016.
- Syahbudin (45 Tahun), Kepala Kantor Pengelola Pasar, *Wawancara*, Gorontalo, 12 September 2016